**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA MENJELANG
KEMERDEKAAN (MASA ISLAM PENJAJAHAN JEPANG)****Siti Khoirotun Nisa, Suherman, Anggun Cahya Pratiwi, Muhammad Putra Fajar, Eko
Ribawati**Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2288230053@untirta.ac.id**ABSTRAK**

Perekonomian di Indonesia menjelang kemerdekaan masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan Kolonial Belanda, karena pada masa itu sektor perekonomian di Indonesia banyak terfokus pada perkembangan sektor perkebunan, seperti kopi, tembakau, karet, kelapa sawit dan tebu sangat di pertahankan oleh pihak Belanda. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia mengalami transformasi besar selama penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang, yang dimulai pada tahun 1945 memiliki dampak yang luas dan berkepanjangan pada kehidupan sosial-ekonomi Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Jepang untuk mempertahankan dominasi Jepang di Asia Tenggara dan meningkatkan produksi dan pengumpulan sumber daya alam Indonesia menandai periode penjajahan.

Ada banyak cara untuk melihat keadaan sosial ekonomi Masyarakat Indonesia selama penjajahan Jepang. Pertama, struktur sosial Masyarakat Indonesia mengalami perubahan sebagai akibat dari konflik yang terjadi antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa. Sementara rakyat biasa mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, anggota elit masyarakat Indonesia, termasuk pengusaha dan pejabat pemerintah, mendapatkan keuntungan dari kebijakan Jepang. Kedua, sumber daya alam diambil dari Indonesia dan tenaga kerja rakyat digunakan oleh pemerintah Jepang untuk kepentingan mereka. Ini menyebabkan gangguan dan penurunan produksi dalam sektor pertanian dan industri. Ketiga, pemerintah Jepang menindas dan menghancurkan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Sistem Perekonomian, Dampak Penjajahan Jepang, Sosial, Masyarakat*

ABSTRACT

The economy in Indonesia before independence was still heavily influenced by Dutch colonial policies, because at that time the economic sector in Indonesia was largely focused on the development of the plantation sector, such as coffee, tobacco, rubber, palm oil and sugar cane which was heavily defended by the Dutch. The socio-economic conditions of Indonesian society experienced a major transformation during Japanese colonialism. Japanese colonization, which began in 1945, had a broad and lasting impact on Indonesia's socio-economic life. Policies made by the Japanese government to maintain Japanese dominance in Southeast Asia and increase production and collection of Indonesia's natural resources marked the colonial period.

There are many ways to look at the socio-economic conditions of Indonesian society during Japanese colonialism. First, the social structure of Indonesian society is experiencing changes as a result of conflicts that occur between groups in power and groups that are not in power. While ordinary people had difficulty meeting their basic needs, elite members of Indonesian society, including businessmen and government officials, benefited from Japanese policies. Second, natural resources were taken from Indonesia and the people's labor was used by the Japanese government for their interests. This causes disruption and decreased production in the agricultural and industrial sectors. Third, the Japanese government oppressed and destroyed the culture and traditions of the Indonesian people.

Keywords: *Economic System, Impact of Japanese Colonization, Social, Society*

PENDAHULUAN

Menjelang kemerdekaan kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan disebabkan oleh faktor terjadinya inflasi dan pemerintah yang tidak sanggup menangani mata uang asing yang beredar

di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda. Keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil begitu juga dengan pajak (Randy 2010). Kondisi ini tak lepas dari masih barunya pemerintahan yang dibentuk, serta banyak gejolak politik yang ada dari luar maupun dalam negeri. Mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan, sementara sektor ekonomi yang masih tertinggal dan dipengaruhi oleh model eksploitasi kolonial. Selain itu, penguasaan asing terhadap sumber daya alam Indonesia menyebabkan banyak kekayaan alam diekspor tanpa nilai tambah dan merugikan ekonomi nasional.

Dengan kurang cepatnya pemulihan krisis ekonomi serta meluasnya pengeluaran pemerintahan, sehingga inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Yang mengakibatkan rakyat mengalami penderitaan karena kenaikan harga. Sehingga kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Masalah- masalah yang dihadapi rakyat Indonesia dari sosial dan ekonominya setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar pada saat itu berakibatkan mengalami kekacauan dan keterpurukan dimana mana. Setelah Indonesia merdeka karena tingginya inflasi yang ada mengakibatkan pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di setiap wilayah yang mana seperti mata uang *De Javasche Bank*, mata uang pemerintahan Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang (berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingginya harga). Pemerintah tidak bisa mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia terutama uang jepang dan belanda, keadaan kas negara serta bea cukai dalam keadaan tak terkendali. Sebagai akibat dari inflasi tersebut para petanilah yang paling menderita karena saat kepundudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang,

Adanya Blokade Belanda terhadap RI beralasan karena pihak Belanda ingin mencegah dimasukkannya persenjataan dan peralatan militer ke Indonesia selain itu belanda tidak ingin hasil hasil perkebunan milik Belanda dan milik Asing lainnya dikeluarkan. Akibatnya dari blokade yang dilakukan oleh pihak belanda yaitu timbulnya keadaan sosial ekonomi yang buruk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Karena pada saat itu kas mengalami kekosongan, sedangkan pengeluaran semakin bertambah besar yang diyakini oleh pihak Belanda bahwa RI secara ekonomi akan ambruk.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kehidupan sosial masyarakat mengalami banyak perubahan. Dikarenakan sebelumnya terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas dalam masyarakat. Sebelum kemerdekaan Indonesia kelas atas yang didominasi oleh warga eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang banyaknya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Rusaknya perkebunan serta pertanian mengakibatkan produksi pangan terutama beras menurun, sehingga kebutuhan penduduk tidak tercukupi. Dibiidang sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja baru yang mana para petani mulai terbagi karena lahan pertanian menurun yang mengakibatkan para petani mengandalkan menjadi buruh untuk mencukupi kehidupannya.

METODE

Metode yang digunakan untuk menyusun artikel adalah penelitian bersifat literatur atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan(library research) adalah mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan denganobyek penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi (Sugiyono, 2010). Dalam menganalisis data dilakukan penelaahan terhadap buku, liteatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan artikel ini. Yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti objek pada latar alamiah.

HASIL PENELITIAN

MASUKNYA JEPANG KE INDONESIA

Sejarah Jepang masuk ke Indonesia dimulai pada abad ke-16 ketika Jepang melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada saat itu, Jepang mengirim kapal-kapal dagang ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk melakukan perdagangan komoditas seperti rempah-rempah, kain sutra, dan keramik. Pada abad ke-19, Jepang mulai memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara dan membangun hubungan diplomatik dengan Hindia Belanda, yang saat itu menguasai wilayah Indonesia. Pada tahun 1863, Jepang membuka konsulat di Batavia (sekarang Jakarta) dan menjalin hubungan dagang dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, Jepang semakin aktif dalam mengembangkan hubungan dengan Indonesia. Pada tahun 1906, Jepang membuka sekolah Jepang pertama di Indonesia, yang dikenal sebagai "Hollandsch-Inlandsche School" atau HIS. Sekolah ini didirikan untuk mengajarkan bahasa Jepang kepada anak-anak pribumi Indonesia.

Selama Perang Dunia II, Jepang berhasil menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Selama pendudukan Jepang, Indonesia mengalami banyak perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari pemerintahan kolonial Belanda, termasuk penggunaan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi dan pendidikan wajib untuk semua anak Indonesia. Namun, pendudukan Jepang di Indonesia juga disertai dengan penindasan dan eksploitasi sumber daya alam. Banyak orang Indonesia yang menderita akibat kebijakan-kebijakan Jepang yang keras selama pendudukan. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan memulai perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang sebenarnya. Meskipun sejarah Jepang di Indonesia tidak selalu positif, hubungan antara kedua negara telah berkembang sejak itu terutama dalam bidang perdagangan dan investasi.

PEREKONOMIAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAH JEPANG**1. Eksploitasi Sumber Daya Manusia dan Alam**

Eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang. Misi Jepang untuk memenangkan Perang Dunia II menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis menghadapi tentara sekutu. Lahan perkebunan yang ada pada masa Hindia Belanda merupakan lahan yang menghasilkan untuk jangka waktu lama. Sementara Jepang banyak membutuhkan dukungan dalam menghadapi PD II. Sehingga Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam PD II. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan untuk mesin perang.

2. Kehidupan Sosial-Ekonomi

Pada kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana praktek eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
- b. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.

- c. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.
3. Kemunduran dalam bidang ekonomi
- a. Sistem ekonomi perang

Ketika mendarat di Indonesia, Jepang mulai menerapkan berbagai macam kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang guna mendukung gerak maju Jepang dalam perang Pasifik. Kebijakan tersebut menuntut rakyat Indonesia untuk mengerahkan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki. Melansir buku Sistem Ekonomi Indonesia karya Darwin Damanik dkk, demi menyokong kebutuhan perang, Jepang merombak struktur ekonomi rakyat Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Berikut beberapa kebijakan ekonomi perang guna mendukung pemerintah Jepang, yaitu:

 1. Mengawasi dan Memperbaiki Prasarana Ekonomi Dikarenakan Belanda menghancurkan sejumlah objek vital, termasuk prasarana ekonomi di Indonesia, Jepang memutuskan untuk menerapkan kebijakan pengawasan dan perbaikan. Jepang memperbaiki beberapa prasarana, seperti jembatan, alat transportasi, telekomunikasi, dan gedung-gedung. Jepang juga mengawasi gerak-gerik praktik ekonomi rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan pengawasan adalah menetapkan pengendalian harga kenaikan.
 2. Memperluas Wilayah Persawahan.

Mengutip buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA/MA kelas XI oleh Dr. Abdurrahman dkk, keadaan produksi beras di Indonesia pada saat itu sangat menurun, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan rakyat pun tidak cukup. Di samping itu, kebutuhan pangan Jepang untuk perang meningkat. Maka dari itu, pemerintah Jepang memperluas wilayah persawahan. Upaya ini dilakukan dengan harapan produksi beras dapat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan perang. Perluasan wilayah persawahan tidak hanya terjadi di pulau Jawa, tetapi juga di Sumatra Timur, Kalimantan, dan Sulawesi
 3. Penanaman Wajib Tanaman untuk Perang

Eksplorasi yang dilakukan pemerintah Jepang adalah penanaman wajib atas tanaman-tanaman yang dibutuhkan ketika perang, yakni pohon kapas dan pohon jarak. Pohon kapas digunakan untuk bahan pakaian, sementara pohon jarak digunakan untuk bahan bakar pesawat dan pelumas senjata. Penanaman paksa ini ternyata memberikan dampak kerusakan pada tanah para petani Indonesia, sebagaimana tertulis dalam buku bertajuk Nippon Pengubah Sejarah karya Arisandi.
 4. Mengawasi Kegiatan Pertanian Kegiatan pertanian rakyat Indonesia diawasi oleh pemerintah Jepang secara ketat. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga hasil pertanian, terkhusus beras.
 5. Jepang juga mewajibkan penyerahan hasil pertanian sebesar 30% untuk pemerintah, 30% diserahkan ke lumbung desa, dan sisanya milik petani.
 - b. Keuangan dan Perdagangan dan Industri
 - Keuangan

Pada masa penjajahan Jepang, investasi asing di Indonesia menurun drastis. Hal ini karena investor asing menghindari Indonesia akibat ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh penjajahan Jepang. Akibatnya, Indonesia kehilangan akses ke modal asing yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

•Perdagangan

Selama masa penjajahan Jepang, sistem perdagangan internasional Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Jepang yang proteksionis. Jepang membatasi akses Indonesia ke pasarnya sendiri dan menghindari impor dari Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi terisolasi dari perdagangan internasional dan sulit untuk berkembang dalam perdagangan global.

•Industri

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, terjadi beberapa kemunduran dalam industri dan perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah pemiskinan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja oleh pihak Jepang untuk kepentingan perang. Banyak industri tradisional mengalami penurunan produksi karena terganggunya pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang keras.

Selain itu, kebijakan ekonomi Jepang yang menitikberatkan pada kepentingan mereka sendiri menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi lokal. Sumber daya alam dan manusia dieksploitasi untuk kepentingan Jepang tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan kemunduran dalam bidang ekonomi dan industri di Indonesia pada masa itu.

KEBIJAKAN JEPANG PADA BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Pada awal masa pendudukan, pemerintah Jepang berupaya meningkatkan hasil produksi dan efektivitas pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kampanye atau propaganda “melipatgandakan hasil”. Propaganda dilakukan melalui film, lagu, pertunjukan kesenian dan sandiwara, maupun melalui media cetak seperti surat kabar, melalui bidang kesenian, , lagu-lagu dengan lirik tentang petani maupun anjuran untuk bertani. Misalnya dari lagu anak-anak yang berjudul Orang Tani (Tjahaja, 13 Februari 1943).

Dalam rangka meningkatkan pertanian, pemerintah membuka lahan yang masih kosong atau mengubah fungsi lahan untuk penanaman padi. Akibatnya, banyak lahan perkebunan maupun perikanan yang dialihfungsikan menjadi persawahan. Salah satu contohnya adalah perkebunan teh di Cipanas, Bogor yang berhenti beroperasi pada masa pendudukan Jepang karena permasalahan modal dan distribusi hasil produksi (Saring & Husin, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Jepang memang tidak terlalu memperhatikan sektor perkebunan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah kolonial. Selain alih fungsi lahan, pemerintah pendudukan Jepang juga berusaha mengurangi penanaman tanaman lain yang tidak berkontribusi langsung untuk mendukung ekonomi perang, yang kemudian digantikan dengan penanaman padi secara intensif. Penanaman bibit padi diatur oleh pemerintah dengan alasan menghasilkan panen yang lebih baik. Pemerintah pendudukan Jepang sempat melarang penanaman padi gadu karena menjadi penyebab penyakit malaria yang datang dari sistem irigasi yang buruk. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, pemerintah pendudukan Jepang mulai mengupayakan kembali penanaman padi gadu secara bertahap di beberapa daerah. Di Kawedanan Ciranjang, padi gadu diizinkan untuk ditanam dengan luas 2.500 hektare tanah, di Kawedanan Cianjur seluas 1.500 Hektare, sedangkan di Kawedanan Sukanegara saat itu belum diizinkan untuk menanam padi gadu karena masih dalam proses penyelidikan dan penelitian lebih lanjut (Tjahaja, 13 Januari 1943).

Di bidang perkebunan, karet menjadi salah satu tanaman yang penting dan juga menjadi bidang industri yang cukup berkembang di Pulau Jawa, karena berkaitan dengan kebutuhan perang (Djawa Baroe, 1 Maret 1943). Pemerintah militer Jepang dengan ketat mengawasi dan mengatur penanaman karet. Sehingga, untuk dapat mengelola perkebunan karet, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah (Zuhdi, 2017). Bagi pemilik kebun karet, harus pula menjual getah bersama dengan lisensinya atau pemberian izin. Getah karet juga hanya boleh dijual jika disertakan dengan lisensinya. Selain itu, ditetapkan pula bahwa harga maksimal getah karet yang diizinkan adalah f 0,17 per kilogram (Tjahaja, 1 Februari 1943). Pada masa pendudukan Jepang, ditekankan pula mengenai

penanaman kapas karena rendahnya angka produksi kapas. Kelangkaan pakaian yang terjadi karena hasil produksi kapas yang rendah, bahkan menjadikan pakaian sebagai alat tukar (Kurasawa, 2015). Di Sukabumi, Jampangkulon Gunchō bahkan menganjurkan setiap keluarga untuk menanam 25 pohon kapas di rumah atau lahan masing-masing. Jenis kapas yang dianjurkan adalah kapas mori. Kebijakan tersebut membuahkan hasil, perusahaan tenun rakyat pun memuaskan bahkan hingga mendapatkan permintaan kapas dari Cirebon (Tjahaja, 29 Maret 1943). Dalam rangka mendukung kebutuhan militer dan perang, pemerintah pendudukan Jepang berupaya meningkatkan produksi tanaman jarak sebab beragam manfaatnya yang sangat penting. Biji dari tanaman jarak dapat diolah menjadi bahan pelumas mesin dan pesawat terbang, maupun berbagai olahan lain seperti campuran bahan untuk membuat sabun (Zuhdi, 2017).

KONDISI MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAH JEPANG

Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang sangat berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masa pendudukan Jepang yang singkat memberi dampak yang penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Dilihat dari segi ekonomi, Jepang menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan pengembangan aktivitas ekonominya.

Sebelum Indonesia merdeka, Jepang pernah menjajah dan membagi wilayah Indonesia menjadi tiga zona pemerintahan militer. Hal ini dijelaskan dalam buku “Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia” karya Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si. (2015: 26). Buku tersebut mencatat bahwa Jepang, yang mengambil alih dari penjajahan Belanda, awalnya berjanji untuk mengubah sistem pemerintahan kolonial. Namun, mereka malah melanjutkan sistem dekonsentrasi dan sentralistik dengan melakukan beberapa perubahan kecil seperti mengubah nama daerah dan pejabat ke bahasa Jepang.

Jepang kemudian merombak sistem pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan strategi militer dan membagi Hindia Belanda menjadi tiga wilayah kekuasaan militer:

1. Sumatera, yang berada di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XXV (Rikugun) dengan pusat di Bukittinggi.
2. Jawa dan Madura, yang berada di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XVI (Rikugun) dengan pusat di Jakarta.
3. Wilayah lainnya, yang berada di bawah Komando Panglima Angkatan Laut (Kaigun) dengan pusat di Makassar.

Setiap wilayah ini dikelola oleh Komandan Angkatan yang disebut Gunseikan dan masing-masing wilayah memiliki peraturan wewenang khusus. Pembentukan pemerintahan militer di ketiga wilayah ini dilakukan oleh Jepang untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan pemerintahan militer serta memanfaatkan setiap wilayah secara berbeda.

Selama masa pendudukan militer Jepang, pemerintah Jepang berupaya mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia melalui berbagai metode. Salah satunya adalah dengan propaganda “Tiga A” yang berarti Jepang sebagai Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia. Jepang juga memberikan kelonggaran kepada bangsa Indonesia untuk beribadah, mengibarkan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” bersamaan dengan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”. Jepang menerapkan beberapa kebijakan terhadap Indonesia sebagai negara jajahan mereka. Program yang paling penting bagi Jepang adalah memobilisasi semua sumber daya di Indonesia untuk keperluan perang.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia menjelang kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang adalah bahwasannya sangat kacau dan sulit. Faktor utama penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia saat itu adalah inflasi yang sangat tinggi, karena Indonesia masih belum memiliki mata uang sendiri. Disamping itu juga faktor yang diberikan Jepang itu sendiri memengaruhi sosial ekonomi Indonesia, dimana Jepang melakukan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya

manusia (kerja paksa) , melakukan propaganda , serta menggunakan uang kas negara untuk kepentingan perang. Kondisi ekonomi pada saat itu sangat kacau, sehingga tidak menghasilkan kemakmuran sosial yang diharapkan oleh banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

Rahmawati Risma, Perkembangan Kondisi Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1940 (Vol 2 No 2), Tahun 2022, JOURNAL OF S SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI.

Lubis, Meisyah Nurliza, Nadhirotul Jannah, and Yulia Prastami. “Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan.” *Faidatuna* 4.2 (2023): 175-188.

Eko Ribawati, M.Pd, Dr. H. Agus Rustamana, M.Pd. “Sejarah Sosial Ekonomi Kajian Masyarakat Jawa dan Banten”. Penerbit Media Edukasi Indonesia, tahun 2023.

Zulkarnain , Onifah Anisa, Keadaan Sosial Ekonomi Pasca Kemerdekaan Indonesia

Inanna, & Nurjannah. (2023). PEREKONOMIAN INDONESIA. Penerbit Tahta Media. Retrieved from

Yasmis, JEPANG DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA, Vol.4, 2007